

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pesatnya perkembangan industri perbankan, kompleksitas transaksi yang terjadi di dalamnya, dan besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi bank, memicu perbankan untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat. Demikian juga pada sisi pengaturan diperlukan adanya peraturan yang relevan dan dapat diimplementasikan dengan kondisi yang ada.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat adapun tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum, bank devisa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut *dual bank system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

Sejalan dengan perkembangan terkini standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia terutama Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 50 (revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (revisi 2006): Pengakuan dan Pengukuran, maka Pedoman Akuntansi Perbankan

Indonesia (PAPI) ini disempurnakan dengan standar terkini dan berbagai regulasi di sektor perbankan, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Pedoman ini diharapkan sangat membantu bagi para pelaksana perbankan dalam mencatat transaksi perbankan sesuai dengan PSAK dan ketentuan perbankan terkini. Sehingga hal ini dapat lebih meningkatkan kredibilitas dan transparansi dunia perbankan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perbankan kepada *stakeholders* maka perbankan wajib untuk menyajikan informasi akuntansi perbankan dalam bentuk laporan keuangan. Informasi akuntansi didefinisikan sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Informasi akuntansi merupakan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal perusahaan sebagai pemegang saham, investor, kreditur, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya untuk menentukan kepentingan mereka terhadap perusahaan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Publikasi laporan keuangan sebagai produk informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya Jamaan, (2008:19).

Setiap perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara benar dan jujur dengan mengungkap fakta sebenarnya yang menjadi kepentingan banyak pihak. Dengan demikian, laporan keuangan dituntut untuk disajikan dengan integritas yang tinggi.

Komponen laporan Keuangan terdiri dari komponen-komponen berikut ini: laporan keuangan (neraca) pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode,

laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos laporan keuangannya.

Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Tujuan laporan keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) adalah: (1) menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi. (2) memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Selain itu laporan keuangan bank juga bertujuan untuk pengambilan keputusan.

Dalam suatu perusahaan, laporan keuangan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting baik internal maupun eksternal. Laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen atas sumber daya pemilik. Lebih lanjut, dalam karakteristik umum penyajian laporan keuangan menurut SAK,(2012), penyajian laporan keuangan yang wajar

mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain dalam entitas. Penyajian laporan keuangan secara jujur dan wajar merupakan karakteristik kualitatif reliabilitas dan integritas laporan keuangan.

Bertentangan dengan tujuan laporan keuangan SAK 2012, yaitu menyajikan informasi secara jujur dan tidak menyesatkan, beberapa tahun yang lalu telah banyak terjadi manipulasi laporan keuangan. Kasus manipulasi data akuntansi telah terjadi pada beberapa perusahaan besar di Amerika seperti, Enron, Tyco, Global Crossing, dan Worldcom maupun beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti PT. Kimia Farma, Bank Century dan Bank Lippo yang sebelumnya mempunyai kualitas audit yang bagus .Detik,( 2009). Dalam kasus manipulasi laporan keuangan, perusahaan berusaha menyajikan data akuntansi yang direkayasa, manajemen laba yang *aggressive* dan kegagalan pelaporan akuntansi lainnya dimana tidak ada lagi transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pelaporan keuangan.

Fenomena skandal keuangan yang terjadi juga dapat menunjukkan suatu bentuk kegagalan integritas laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan. Penyajian laba dalam laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1*, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Informasi dalam laporan keuangan harus berguna bagi kreditor, investor, dan pemakai lain yang potensial untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan investasi atau kredit yang rasional.

Laporan Keuangan adalah informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Laporan Keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang berintegritas. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.2* menjelaskan bahwa integritas informasi laporan keuangan merupakan informasi

yang terkandung dalam laporan keuangan disajikan secara wajar, dan secara jujur menyajikan informasi.

Kualitas laporan pelaporan keuangan hingga saat ini masih beragam, namun pada prinsipnya pengertian kualitas laporan keuangan dapat dipandang dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam tingkat pengungkapan wajib dan sukarela pelaporan keuangan perusahaan.

Kerangka pelaporan keuangan yang berkualitas yaitu : menggambarkan suatu tingkat transparansi yang tinggi, yang terlihat dari tingkat kelengkapan pengungkapan pelaporan keuangan perusahaan yaitu *the quality of corporate reporting (voluntary and mandatory)*. Informasi pelaporan keuangan dikatakan berkualitas tinggi jika laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa yang akan datang atau berasosiasi secara kuat dengan arus kas operasi dimasa yang akan datang.

Definisi integritas laporan keuangan menurut Mayangsari (2003) yaitu “Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur”. Definisi integritas laporan keuangan sebagaimana dikemukakan oleh Mayangsari sesuai dengan karakteristik laporan keuangan menurut SAK (2012), bahwa laporan keuangan hendaknya memenuhi prinsip keandalan. Pengertian keandalan menurut SAK (2012) adalah informasi yang memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat disajikan. Laporan keuangan seharusnya dipersiapkan dengan integritas yang tinggi, hal ini penting dikarenakan mempengaruhi pengambilan keputusan pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu untuk mengukur integritas informasi laporan keuangan, Standar Akuntansi Keuangan menetapkan karakteristik kualitatif yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi akuntansi harus memenuhi tiga karakteristik kualitatif informasi akuntansi yaitu *relevance, objectivity* dan *reability*. Informasi dikatakan

*relevance* apabila dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan menguatkan atau mengubah pengharapan pengguna laporan keuangan. Informasi dikatakan *reliable* apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai laporan keuangan bergantung kepada informasi tersebut. Sedangkan dikatakan *objective* apabila informasi tersebut terbebas dari pengaruh hal lain yang dapat mempengaruhi independensi informasi. Integritas laporan keuangan dapat dicapai apabila laporan keuangan mampu memberikan informasi yang memiliki karakteristik-karakteristik tersebut .Jamaan,( 2008:6).

Laporan keuangan yang berintegritas memenuhi kualitas *reliability* yang terdiri dari 3 komponen, yaitu *verifiability*, *representational faithfulness* dan *neutrality*. Integritas informasi laporan keuangan dapat diproksi dengan konservatisme. Konservatisme merupakan sebuah prinsip kehati-hatian dalam mengakui aktiva dan laba oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian. Standar Akuntansi Keuangan (SAK, 2004) menetapkan karakteristik kualitatif yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan yaitu *cost and benefit*, *relevance*, *reliability*, *comparability*, dan *materiality*.

Di Indonesia kasus-kasus manipulasi skandal laporan keuangan, seperti PT. Lippo, Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi pada biaya dan pendapatan (Gideon, 2005). Dalam kasus laporan keuangan ganda PT. Lippo, TBK atau Lippogate itu juga merupakan skandal yang sangat serius karena melibatkan bukan hanya badan swasta, tapi juga institusi-institusi yang merupakan *instrument* kepanjangan tangan pemerintah, misalnya BPPN, Bapepam, Bursa Efek Jakarta (BEJ), serta Bank Indonesia (BI). Skandal *Lippogate* dimulai kasus laporan keuangan ganda yang semua bergkategori “*audited*” oleh Bank Lippo pada September 2002 dan Desember 2003. ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Kasus Bank Century yang laporan keuangannya dimanipulasi oleh pemiliknya yaitu Robert Tantular. Jumlah yang digelapkan diduga sebesar 13 triliun. Dugaan manipulasi tersebut dikuatkan dengan adanya temuan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan posisi rasio kecukupan modal (CAR) Century per Oktober 2008 adalah 2,02 persen yang seharusnya persyaratan untuk pendanaan jangka pendek haruslah 8 persen.

Sedangkan dalam laporan keuangan *unaudited* per September 2008 yang dilaporkan manajemen lama menyebutkan, CAR perseroan masih si posisi 2,02 persen. Padahal Bank Century baru saja mendapat Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dari BI sebesar 6,7 triliun. Ditambah lagi, lanjut dia, manajemen lama juga banyak melakukan kecurangan-kecurangan seperti banyak mencantumkan kredit fiktif dan *Letter of Credit* (L/C) fiktif dalam laporan keuangannya serta aset-aset yang ternyata tidak jelas.

Ukuran integritas laporan keuangan secara intuitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diukur dengan konservatisme serta keberadaan manipulasi laporan keuangan yang biasanya diukur dengan manajemen laba (Mayangsari, 2003:3). Basu (1997:4) menafsirkan konservatisme sebagai kecenderungan akuntan yang memerlukan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi untuk memverifikasi pengakuan *good news* daripada *bad news* sebagai keuntungan. Konservatisme mengakui biaya atau rugi yang mungkin terjadi, tetapi tidak segera mengakui laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar.

Widya (2005:3) menyatakan bahwa secara intuitif prinsip konservatisme bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksi kondisi mendatang yang sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Karakteristik informasi dalam prinsip konservatisme ini dapat menjadi salah satu faktor untuk mengurangi manipulasi laporan keuangan dan meningkatkan integritas laporan keuangan.

Interprestasi umum dari konservatisme dalam akuntansi yaitu tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang diperlukan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak *overstated* dan kewajiban atau beban tidak *understated*. Prinsip konservatisme pada masa sekarang lebih dikenal dengan prinsip *prudence* SFAC (8, 2010). Karakteristik informasi dalam prinsip konseravatisme ini dapat menjadi salah satu faktor untuk mengidentifikasi manipulasi laporan keuangan dan

mengetahui apakah integritas laporan keuangan telah diterapkan dalam penyajian laporan keuangan.

Terungkapnya skandal manipulasi yang terjadi, menyebabkan kredibilitas banyak pihak mulai dipertanyakan, misalnya saja pihak internal perusahaan yang menjalankan mekanisme struktur *corporate governance*. Menurut Martanai dkk (2011) informasi keuangan adalah sumber pertama yang independen dan terpercaya, alat komunikasi kinerja perusahaan. Pelaporan keuangan merupakan daya tarik utama yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Integritas laporan keuangan sangat tergantung pada kinerja dan perilaku dari mereka yang terlibat dalam ekosistem pelaporan keuangan, khususnya direksi, manajemen dan auditor. Dengan kata lain, Integritas laporan keuangan bergantung pada tata kelola perusahaan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Publikasi laporan keuangan sebagai produk informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Proses penyusunan laporan keuangan ini melibatkan pihak pengurus dalam pengelolaan perusahaan, di antaranya adalah pihak manajemen. Untuk menilai integritas laporan keuangan yang disajikan, peranan dewan komisaris dalam perusahaan publik melakukan pengawasan dan menjamin tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) (*Good Corporate Governance*) guna menghasilkan integritas informasi laporan keuangan yang bermutu.

Unsur *corporate governance* terdapat dalam laporan keuangan yang merupakan sebuah rangkaian tentang sebuah proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Penerapan *corporate governance* yang baik berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan, perusahaan atau manajemen akan sulit untuk melakukan manipulasi akuntansi karena terdapat pengawasan dari dewan komisaris sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berintegritas. *Corporate governance* dalam

penelitian ini diproksi dengan tiga mekanisme yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit.

Hancurnya integritas laporan keuangan, memicu tumbangnya perusahaan-perusahaan besar tersebut diatas, kasus ini melibatkan banyak pihak dan berdampak cukup luas. Keterlibatan CEO, komisaris, komite audit, internal auditor, sampai pada eksternal auditor, Susiana dan Herwati, (2007). Untuk menjamin integritas laporan keuangan, diperlukan proses monitoring secara efektif melalui kepemilikan institusional terhadap pihak manajemen. Presentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mengurangi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sebagai kepentingan manajemen.

Pada penelitian ini, mekanisme *corporate governance* yang akan dikaji terdiri dari ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, dan pada penelitian ini disesuaikan variabel yang cocok dengan karakteristik perusahaan di Indonesia, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penelitian ini memilih mekanisme tersebut karena dianggap berpengaruh terhadap pelaksanaan *corporate governance*, di mana keempat mekanisme tersebut bertugas untuk mengendalikan dan mengontrol perusahaan secara langsung sehingga dapat meminimalisir masalah dengan keagenan yang mungkin terjadi akibat perbedaan kepentingan, dan akan mengurangi biaya keagenan.

Kepemilikan Institusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal manajemen. Januarti (2008) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan, sehingga diharapkan adanya monitoring atas keputusan manajemen. Adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen akan mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik atau sesuai dengan yang diharapkan *principal* karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Noorizkie,2013).

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemegang saham. Kepemilikan

manjerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham.

Komite audit bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas proses perusahaan dalam memproduksi data finansial dan kontrol internal. Eksistensi komite audit terletak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Eksistensi dari komite audit dengan proporsi yang tinggi pada proporsi direktur independen akan mereduksi biaya keagenan.

Komisaris *Independent* merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajemen. Pemonitoran oleh komisaris independen atau eksternal dinilai mampu memecahkan masalah keagenan..

Pada 15 September 2008, Lehman Brothers meminta perlindungan atas kebangkrutan sesuai Bab 11 Undang-undang Kepailitan AS. Kewajiban utang Lehman Brothers terhadap bank dinyatakan sejumlah 613 miliar dolar AS. Dimana sebesar 155 miliar dolar AS utang obligasi. Sementara total asset Lehman Brothers yang dimiliki hanya sejumlah 639 miliar dolar AS. JP Morgan Chase & Co dan Citigroup meminta tambahan penjaminan sebesar 21 miliar dolar AS ketika Lehman mulai terguncang. Laporan itu menyebutkan, pada 11 September 2008 JP Morgan meminta tambahan jaminan 5 miliar dolar AS. Permintaan jaminan oleh para kreditor Lehman berdampak langsung terhadap likuiditas Lehman. Ini menjadi penyebab utama kebangkrutan Lehman.

Selain itu, Auditor Ernst & Young sebagai auditor keuangan Lehman Brothers juga dinilai lalai, dan melaporkan hasil audit palsu soal keuangan lembaga keuangan terbesar dan bergengsi di AS tersebut. Krisis Lehman Brothers bermula dari macetnya kredit perumahan kelas dua pada pertengahan tahun 2008, puncaknya pada penutupan usaha Lehman Brothers yang merupakan perusahaan lembaga keuangan dan investasi yang menyebabkan kesulitan likuiditas bank dan lembaga keuangan non bank. Sehingga ada kasus penyesatan

informasi yang material dalam akuntansi Lehman. Menurut laporan Auditor Ernst & Young, tersirat bahwa Lehman menggunakan rekayasa akuntansi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dolar AS di pembukuannya. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan ketergantungan dari utangnya. Para pejabat senior Lehman, juga auditor mereka Ernst & Young, sadar akan tindakan ini. (Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol 6 April 2003)

Kemudian pada kasus Bank Lippo terjadi pembukuan ganda pada tahun 2002. Pada tanggal 7 Maret 2003 Bapepam mempublikasikan tiga versi laporan keuangan Bank Lippo. Laporan yang berbeda itu, pertama, yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002. Kedua, laporan ke BEJ pada 27 Desember 2002, dan ketiga, laporan yang disampaikan akuntan *public* kepada manajemen bank lippo pada tanggal 6 Januari 2003, dalam hal ini kantor akuntan publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan auditor Ruchjat Kosasih dan disampaikan kepada manajemen Bank Lippo pada 6 Januari 2003. Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan “Opini wajar tanpa pengecualian” adalah laporan yang disampaikan pada 6 Januari 2003. Akibat adanya manipulasi tersebut maka Bapepam menjatuhkan sanksi denda kepada Bank Lippo sebesar Rp 2,5 miliar, karena pencantuman kata “diaudit” dan “opini wajar tanpa pengecualian” didalam laporan keuangan 30 September 2002 yang dipublikasikan pada 20 November 2002, dan sanksi denda sebesar Rp. 3,5 juta kepada Ruchjat Kosasih selaku partner kantor akuntan publik (KAP) Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja karena keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai penurunan agunan yang diambil alih (AYDA) Bank Lippo selama 35 hari. (Jurnal akuntansi bisnis, Vol II No.3, Agustus 2003).

Kekuranghati-hatian Direksi PT Bank Lippo Tbk, dalam mencantumkan kata “diaudit” dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002. Kelalaian Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, berupa keterlambatan dalam menyampaikan peristiwa penting dan material mengenai penurunan nilai AYDA PT Bank Lippo Tbk kepada Bapepam. Kelalaian yang

dilakukan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, partner KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja membuat laporan keuangan tidak benar dan mempengaruhi kualitas audit.

Bank merupakan lembaga yang dikenala sebagai *risk taking entities*. Usaha bank selalu dihadapkan pada pengambilan resiko yang besar, seperti dalam aktifitas pendanaan, perkreditan dan *treasury*. Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan menjadi penting karena dapat mengurai simetri informasi yang menyebabkan kerugian bagi *stakeholder*, terutama investor dan penabung. Laporan keuangan dan pengungkapannya penting dan berarti bagi manajemen sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tata kelola (*corporate governance*) dan kinerja perusahaan kepada *stakeholder*. Penyebab lainnya, yaitu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris selaku pengawas pelaksanaan tata kelola pada perusahaan belum dilaksanakan dengan baik.

Selain dari pihak perusahaan, auditor eksternal (akuntan publik) sebagai pihak independen yang memberikan opini mengenai kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan kredibilitasnya sebagai pihak independen. Apalagi setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP). Susiana dan Arlee, (2007). Profesi akuntan merupakan profesi yang mempunyai peran penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

*Tenure* dan spesialisasi audit merupakan hal yang selama ini diperdebatkan dapat mempengaruhi independensi auditor. Sedangkan, penelitian untuk *client importance* di Indonesia masih jarang dilakukan. Penelitian ini hanya meneliti *tenure* spesialisasi audit untuk diuji apakah pengaruhnya terhadap kualitas audit. Kualitas audit dalam penelitian ini diproksikan oleh adanya *earning management*, yaitu dari akrual diskresioner absolut.

Kecurangan laporan keuangan yang melibatkan kantor akuntan publik mendorong Kongres Amerika Serikat untuk mengesahkan *Sarbanes-Oxley Act*

pada tahun 2002 yang merupakan awal reformasi atas profesi akuntan publik, tidak saja di Amerika Serikat melainkan juga di Negara-negara lain. Dalam peraturan tersebut diatur terkait beberapa peraturan yang mengatur kebijakan akuntan publik baik kantor akuntan publik maupun *partner* audit. Dalam *Sarbanes-Oxley Act* diatur pada sesi 203, terkait *partner* audit yang dibatasi penugasan auditnya paling lama lima tahun buku berturut-turut.

Dimasukkannya ketentuan yang mewajibkan rotasi *partner* audit kedalam *Sarbanes-Oxley Act* tidak terlepas dari pertimbangan bahwa terlalu lamanya pelaksanaan audit oleh auditor independen pada satu klien akan berpotensi menciptakan kedekatan (*closeness*) antara auditor bersangkutan dengan manajemen klien yang diauditnya. Kedekatan hubungan antara auditor dan kliennya diyakni berdampak negative terhadap independensi, serta mengurangi keandalan dan kualitas audit sehingga berkontribusi bagi terjadinya skandal-skandal keuangan di Amerika Serikat.

Peraturan terkait rotasi audit yang ada di *Sarbanes-Oxley Act* selanjutnya digunakan dan diadopsi oleh beberapa Negara lain, salah satunya Negara Indonesia. Peraturan terkait rotasi ini pertama kali diterbitkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh suatu kantor akuntan *public* kepada klien hanya boleh dilaksanakan paling lama lima tahun buku berturut-turut, sedangkan bagi seorang *partner* audit disuatu kantor akuntan *public*, pemberian jasa audit kepada klien hanya boleh dilaksanakan paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Hal ini selanjutnya didukung dalam Peraturan BAPEPAM No. VIII. A.2 (Kep. 20/PM/2002).

Kewajiban rotasi kantor akuntan *public* dan *partner* audit juga merupakan salah satu ketentuan yang dimasukkan ke dalam Undang-undang tentang Akuntan Publik. Dalam Undang-undang Akuntan Publik ketentuan ini dimasukkan dalam Pasal 4. Pasal 4 menyatakan bahawa terdapat pembatasan tenur audit, namun berapa lamanya pembatasan tergantung pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah PMK No.17 tahun 2008. Pembatasan tenur selama enam tahun buku berturut-turut dan masa tunggu dua tahun juga berlaku

bagi kantor akuntan *public* sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Akuntan Publik.

*Auditor Tenure* adalah lamanya seorang auditor bekerja dan berhubungan dengan klien, yaitu lamanya waktu seorang auditor bekerja dalam kontrak (Handayani, 2008). Dutton dkk (1994) menyatakan bahwa semakin lama seorang berada dalam organisasi atau perusahaan maka dia akan semakin menjadi bagian dalam perusahaan atau organisasi untuk kategorisasi. Dengan demikian, hal ini dapat mengganggu independensi auditor dalam jangka panjang.

Adanya peraturan rotasi yang ada di Indonesia, ternyata dinilai lebih ketat daripada peraturan di Amerika Serikat. Ketatnya aturan rotasi ini telah menimbulkan banyak reaksi dan perdebatan. Perdebatan mengenai perlu tidaknya keberadaan regulasi rotasi ini telah mendorong dilakukannya penelitian yang ditunjukkan untuk memberikan bukti empiris bagi masing-masing argumen mengenai konsep rotasi partner audit maupun kantor akuntan publik. Namun demikian, hingga kini penelitian-penelitian tersebut masih memperlihatkan hasil yang berseberangan. Namun demikian, hingga kini penelitian-penelitian tersebut masih memperlihatkan hasil yang bertolak belakang. Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang memberikan dukungan bagi keberadaan regulasi kantor akuntan publik dan *partner* audit. Misalnya penelitian Chi dan Huang (2005), Carey dan Simnett (2006), Stanley dan DeZoort (2007) yang mendapatkan hasil bahwa kualitas audit semakin rendah semakin sering bertambahnya *tenure* kantor akuntan publik.

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Myers *et al.* (2003) yang menunjukkan hasil bahwa kualitas audit justru semakin meningkat seiring dengan bertambah lamanya *tenure* kantor akuntan publik dan *tenure* partner audit, serta penelitian Chen *et al.* (2008) yang membuktikan adanya peningkatan kualitas audit seiring bertambahnya *tenure partner* audit. Selain itu, penelitian Carlallo dan Nagy (2004) juga menunjukkan kegagalan audit lebih banyak terjadi pada tiga tahun pertama perikatan audit, dan tingkat kegagalan ini semakin berkurang seiring *tenure* kantor akuntan publik yang semakin lama. Hal yang

sama juga ditemukan dalam penelitian Cameran *et al* (2008) yang menyatakan bahwa regulasi terkait rotasi auditor tidak akan dapat menambah kualitas audit.

Selanjutnya, riset terkait rotasi audit ini juga banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian Mayangsari (2007) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh negaif tenur kantor akuntan *public*, baik terhadap kualitas audit maupun presepsi investor atas kualitas audit. Penelitian yang berbeda dilakukan dalam penelitian Maradona (2009), penelitian tidak hanya menggunakan tenur kantor akuntan *public*, namun juga tenur *partner* KAP, hasil penelitian ini memberi bukti empiris bahwa terjadi peningkatan dalam kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor independen seiring bertambahnya tenur kantor akuntan *public*. Sementara itu, tidak terjadi perubahan dalam kualitas audit seiring dengan bertambahnya tenur *partner* audit.

Mengukur kompetensi auditor dari *tenure* (jangka waktu penugasan audit, rotasi, spesialisasi, workload dan PP; (pendidikan profesional lanjutan), sedangkan independensi dapat diukur dari *tenure* dan rotasi. Sedangkan, dalam penelitian ini hanya berfokus pada pengujian pengaruh *tenure* audit dan auditor spesialisasi proksi kualitas audit.

Munculnya peraturan yang mewajibkan kantor akuntan publik melakukan rotasi menyebabkan timbulnya pro-kontra atas peraturan rotasi tersebut. Pihak yang pro atas peraturan rotasi tersebut berpendapat bahwa semakin panjang *tenure* maka akan mengurangi tingkat independensi dan objektivitas perusahaan. Dengan adanya peraturan mengenai rotasi audit, maka kepercayaan publik atas opini audit yang dikeluarkan karena auditor akan lebih independen dalam menyampaikan temuan auditnya.

Namun, pihak yang kontra akan peraturan rotasi ini mengatakan bahwa kualitas audit akan semakin meningkatkan seiring dengan bertambah panjangnya *tenure*. Gul et al (2009) menyatakan bahwa kualitas audit sangat minim saat tahun perikatan awal. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan auditor sehingga meningkatkan tingkat ketergantungan auditor terhadap estimasi yang dibuat oleh klien. Hal ini yang akan meningkatkan risiko terjadinya kegagalan dalam melaksanakan audit. De Angelo (1981) menyatakan bahwa pemahaman karakteristik audit klien bersifat akumulatif dan dapat bertambah seiring dengan

bertambahnya *tenure* audit. Hal ini disebabkan bahwa auditor melakukan pembelajaran pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti juga menambahkan efek auditor spesialis industri sebagai karakteristik yang mampu mempengaruhi kualitas audit. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dampak sifat auditor sudah mulai dilakukan sebagai bagian untuk mengetahui pengaruh *tenure* KAP maupun partner audit terhadap kualitas audit. Penelitian Chi dan Huang (2005) menganalisis efek moderasi *tenure* kantor akuntan publik berdasarkan ukuran kantor akuntan publik, yaitu antara kantor akuntan publik *the big five* dan kantor akuntan publik non-*Big Five*. Chi dan Huang mendapatkan hasil bahwa dampak negative *tenure* akuntan publik yang terlalu singkat terhadap kualitas audit relative rendah di kantor akuntan publik *the Big Five* hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giri (2010) yang menemukan bahwa kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik internasional memiliki kemampuan memoderasi pengaruh *tenure* terhadap kualitas audit.

Karakteristik lain dari suatu kantor akuntan publik adalah spesialisasi industri, dimana kantor akuntan publik dalam hal ini seharusnya memiliki auditor yang akan mengembangkan keahlian spesifik pada industri tertentu sebagai jawaban atas kebutuhan klien akan audit yang berkualitas. (Craswell *et al.* 1995). Penelitian yang dilakukan oleh Balsam *et al.* (2003) menunjukkan bahwa seorang auditor yang melakukan spesialisasi industri cenderung menghasilkan kualitas laba yang lebih baik.

Pengukuran auditor spesialisasi penelitian ini mengikuti pengukuran pada penelitian yang dilakukan oleh Gul, Fung, dan Jaggi (2009), di mana auditor spesialis diidentifikasi dengan melihat pangsa pasar (*market share*) berdasarkan total asset perusahaan yang diaudit oleh suatu KAP pada suatu industri tertentu. KAP dengan persentase pangsa pasar total asset yang paling tinggi disuatu industri ditentukan sebagai spesialis pada industri tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi integritas laporan keuangan yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga menanggung peranan penting dalam

perusahaan yang melakukan manipulasi data akuntansi. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak dan perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat Nasution dan Setiawan,( 2007:10). Berbeda dengan perusahaan kecil yang cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Peraturan penyampaian informasi akuntansi dalam laporan keuangan telah dibuat didalam PSAK, akan tetapi masih banyak perbankan yang belum menyampaikan informasi akuntansi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan PSAK yang berlaku, berdasarkan fenomena dan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Pengaruh *Corporate Governance*, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2010 – 2013)”**

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *corporate governance*, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan integritas laporan keuangan pada perusahaan ?
2. Apakah *corporate governance*, kualitas audit, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan?
3. Apakah *corporate governance* berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan?
4. Apakah Kualitas Audit berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap integritas laporan keuangan ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis *corporate governance*, kualitas audit, ukuran perusahaan dan integritas laporan keuangan pada beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara *corporate governance*, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial *corporate governance* antara terhadap integritas laporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial kualitas audit antara terhadap integritas laporan keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial antara ukuran perusahaan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kegunaan dari aspek teoritis dan dari aspek praktis.

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

1. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya.
2. Bagi para akademis, penelitian ini diharap dapat memberikan tambahan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang audit.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bahwa *corporate governance*, kualitas audit, dan ukuran perusahaan dapat meningkatkan dan menjaga integritas laporan keuangan.
2. Bagi akuntan publik terutama bagi auditor sebagai suatu tinjauan yang dapat bermanfaat dalam rangka menyediakan informasi yang berkualitas bagi para pemakai laporan keuangan.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dala 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub-bab antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang isi penelitian mulai dari gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian sampai pada sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang rangkuman teori yang berkaitan dengan topik atau masalah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan ruang lingkup penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis peneltitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas, dan teknik analisis data, dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang karateristik responden yang digunakan dalam pengumpulan data berkaitan dengan judul penelitian, hasil penelitian yang dipaparkan dalam bentuk sub-bab dan harus menjawab pertanyaan penelitian/rumusan masalah, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini disajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis temuan peneliti, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian, dan saran yang dirumuskan secara kongkrit.